

BUDAYA PATRIARKIS DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2014

(Studi pada PDIP, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung)

Dian Septi Delpia, Robi Cahyadi K.

Alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung

Email: robicahyadi9@gmail.com

ABSTRAK

Perempuan sesungguhnya memiliki peran yang sama (setara) dengan kaum laki-laki termasuk dalam kehidupan politik, salah satunya adalah dengan menjadi anggota legislatif. Namun kenyataannya diduga bahwa budaya patriarkis dalam pencalonan anggota legislatif masih menjadi hambatan bagi kaum perempuan karena masih didominasi kaum laki-laki, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan kaum perempuan di lembaga legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Budaya Patriarkis dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilihan Legislatif 2014 pada PDIP, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, budaya patriarkis ternyata tidak menjadi hambatan bagi calon anggota legislatif perempuan pada PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung dalam pemilihan calon anggota legislatif pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014. Hal ini didasarkan pada deskripsi jawaban responden yang secara umum menunjukkan bahwa partai politik tidak membatasi perempuan dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif serta memberikan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik praktis menghadapi Pemilu Legislatif 2014.

Kata Kunci: Budaya Patriarkis, Pemilu Legislatif

ABSTRACT

Women actually have the same role (equivalent) with men, including in the political life, one is to be a member of the legislature. But the reality is suspected that the culture of patriarchy in the nomination of members of the legislature is still a barrier for women as it is still dominated by men, so the impact on the unfulfilled quota of 30% representation of women in legislative institution. The purpose of this study was to determine patriarchal culture in the Legislative Candidacy on Legislative Elections Year 2014 on PDIP, PKS Nasdem Party of Bandar Lampung. The method used is descriptive, qualitative approach. Results of research indicate that the patriarchal culture is actually not a barrier to legislative women candidates on PDIP, PKS Nasdem Party of Bandar Lampung in the Legislative Candidates in Legislative Elections 2014. It is based on the description of the respondents generally indicate that the political parties do not restrict women running for legislative candidates and to provide equal opportunities for women to participate actively in politics face of the legislative elections year 2014.

Keywords: Patriarchal Culture, Legislative Elections

PENDAHULUAN

Peranan kaum perempuan dalam aktivitas politik ini merupakan kemajuan besar dalam dekonstruksi budaya patriarkis pada realitas sosial. Budaya patriarkis bercirikan ketidakadilan gender antara kaum laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan selalu berada pada posisi tidak menguntungkan, termarginalkan dan terpinggirkan. Kaum laki-laki mendominasi dan menghegemoni pada hampir seluruh lini kehidupan, termasuk politik. Hegemoni ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan peran antara kaum perempuan dan laki-laki dalam politik, paradigma berfikir dan budaya patriarkis menempatkan perempuan hanya pantas bekerja di wilayah privat (domestik) dan tidak pantas bekerja di wilayah publik. Semangat dan perjuangan kaum perempuan untuk melaksanakan peranannya pada setiap dinamika atau perkembangan politik tidak surut karena hal-hal tersebut di atas. Maksudnya adalah dalam dunia politik, arah perjuangan aktivitas perempuan adalah kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Kaum perempuan kini tidak lagi digambarkan sebagai sosok yang lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Perempuan menjadi partner laki-laki dan bukan sebagai rival, karena secara fundamental laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya satu. Laki-laki dan perempuan adalah pelengkap bagi yang lain, salah satu dari mereka tak akan bisa hidup tanpa aktivitas bantuan yang lain.

Kiprah dan peran serta kaum perempuan di ranah politik menjadi suatu kajian yang menarik, terlebih dalam tatanan kebudayaan patriarkis yang sering mengidentifikasi perempuan dengan berbagai aktivitas di wilayah privat, yaitu seperti hanya mengurus rumah tangga. Perempuan melalui peran serta dalam politik menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan hal yang sama dengan laki-laki, yaitu beraktivitas di wilayah politik.

Kehadiran para aktivis perempuan dalam konteks politik setidaknya telah membuka mata dan meluruskan pandangan dan kesadaran baru, bahwa kaum perempuan memiliki hak dan perlakuan yang sejajar sebagaimana laki-laki. Kedudukan bagi kaum perempuan dewasa ini merupakan bagian dari keutuhan pembangunan

bangsa di segala bidang kehidupan masyarakatnya. Posisi kesetaraan gender dan laki-laki merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, karena dengan pandangan yang demikian akan terlihat eksistensi kaum perempuan dalam bidang politik, khususnya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif.

Pemilu Legislatif sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu Legislatif diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik. Pemilihan para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif ini merupakan perwujudan dari demokrasi Indonesia yang menganut sistem kepartaian melalui partai politik. Partai politik merupakan sarana yang penting sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi modern merupakan suatu keniscayaan. Partai politik merupakan institusi kunci bagi demokrasi dan akan tetap menjadi satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan.

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kendala yang dihadapi politisi perempuan dalam mewakili kepentingan kaumnya dalam legislatif di antaranya adalah hambatan akan kebutuhan anggota legislatif yang cerdas dan mumpuni baik secara materi maupun praktek dalam bidang politik.

Seorang wakil perempuan yang handal tidak akan mungkin dilahirkan tanpa pengetahuan yang mumpuni. Sosialisasi politik selama puluhan bahkan ratusan tahun yang salah kaprah. Sosialisasi politik kepada perempuan sudah terlanjur lama digiring ke arah yang membuat perempuan sebagai pihak yang *subsidiari*. Kondisi saat ini perempuan jarang yang mampu dan tahu bagaimana caranya berkiprah di dunia politik setelah sekian lama dihindarkan dari

keegoisan untuk membagi sosialisasi politik kepada perempuan. Kaum perempuan berbeda dengan laki-laki, sebab perempuan punya hambatan situasional. Hambatan yang bersifat 'keibuan' merupakan hambatan yang paling serius bagi perempuan untuk dapat terjuar total ke ranah politik. Perempuan tidak punya banyak waktu karena harus mengurus rumah tangga, sehingga pikiran dan tenaganya tidak dapat difokuskan untuk berjuang bagi kaumnya di kursi legislatif.

Pemilihan para calon anggota legislatif dari partai politik secara langsung, mengindikasikan bahwa suara rakyat adalah penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik, karena partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Upaya yang lebih penting lagi adalah untuk memberdayakan partai politik, agar partai lebih kuat dan mandiri, sehingga melahirkan kebijakan partai yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Rakyat dalam wacana negara demokrasi menjadi titik sentral karena pada hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat.

Keterwakilan kaum perempuan dalam daftar calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik adalah 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum:

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal

calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimanakah Budaya Patriarkis dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilihan Legislatif 2014 pada PDIP, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung?"

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Budaya Patriarkis dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilihan Legislatif 2014 pada PDIP, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung.

TEORI DAN METODE

Budaya Patriarki

Menurut Kamla Bhasin (2007: 65), patriarki adalah sistem pengelompokan masyarakat sosial yang mementingkan garis keturunan bapak/laki-laki. Hal ini relevan dengan konsep patrilineal yaitu hubungan keturunan melalui garis keturunan kerabat pria atau bapak.

Nawal El Sadaawi (2001: 15), budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Kebanyakan sistem patriarki juga adalah patrilineal. Distribusi kekuasaan menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual.

Pada tatanan kehidupan sosial, konsep patriarki sebagai landasan ideologis, pola hubungan gender dalam masyarakat secara sistematis dalam praktiknya dengan pranata-pranata sosial lainnya. Faktor budaya merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kekerasan

terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan terlalu diprioritaskannya laki-laki (maskulin).

Menurut Gadis Arivia (2004: 2-3), budaya patriarki merupakan perwujudan dari perbedaan gender yang tidak melahirkan ketidakadilan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisai, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Pada masyarakat patriarki, nilai-nilai kultur yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa sikap masyarakat patriarki yang kuat ini mengakibatkan masyarakat cenderung tidak menanggapi atau berempati terhadap segala tindak kekerasan yang menimpa perempuan. Sering dijumpai masyarakat lebih banyak komentar dan menunjukkan sikap yang menyudutkan perempuan. Patriarki pada awalnya merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut suatu jenis keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki, yaitu rumah tangga besar patriarch yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak, dan pelayan rumah tangga yang semuanya berada di bawah kekuasaan atau hukum bapak sebagai laki-laki penguasa itu. Istilah ini kemudian mengalami perkembangan dalam hal lingkup institusi sosial menjadi lebih luas lagi, dari tingkat masyarakat sampai ke tingkat negara. Misalnya lembaga perkawinan, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, institusi ketenagakerjaan, media massa, birokrasi negara dan lain-lain. Pada titik ini juga pengertian dari 'hukum bapak' berkembang menjadi hukum suami, hukum pimpinan, hukum pejabat birokrasi,

atau singkatnya adalah 'hukum laki-laki' yang secara umum berlaku atau beroperasi pada hampir semua institusi sosial, ekonomi, hukum, politik, dan budaya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada budaya patriarkis dalam Pemilihan Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 pada PDIP, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Menjadi hambatan, apabila di dalam pencalonan caleg perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung masih terdapat budaya patriarkis yang menempatkan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.
2. Tidak menjadi hambatan, apabila di dalam pencalonan caleg perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung tidak terdapat budaya patriarkis yang menempatkan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Informan	Jumlah
1	Caleg perempuan PDI Perjuangan Bandar Lampung	orang 2
2	Caleg perempuan PKS Bandar Lampung	orang 2
3	Caleg perempuan Partai Nasdem Bandar Lampung	orang 2
4	Pengurus PDI Perjuangan Bandar Lampung	orang 1
5	Pengurus PKS Bandar Lampung	orang 1
6	Pengurus Partai Nasdem Bandar Lampung	orang 1
Total Infoman		orang 9

Jenis data penelitian ini meliputi :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian
2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, seperti buku, majalah, atau literatur lain

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara itu teknik pengolahan data dilakukan dengan tahapan editing dan interpretasi

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang di dapat dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi, dengan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data (*Display*) dan mengambil Kesimpulan (Verifikasi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Budaya Patriarkis dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilihan Legislatif 2014

Budaya patriarkis dalam Pemilihan Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menjadi hambatan, apabila di dalam pencalonan caleg perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung masih terdapat budaya patriarkis yang menempatkan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebaliknya tidak menjadi hambatan, apabila di dalam pencalonan caleg perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung tidak terdapat budaya patriarkis yang menempatkan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Secara umum terdapat persamaan bahwa budaya patriarkis tidak menjadi hambatan bagi calon anggota legislatif perempuan pada PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Calon Legislatif pada

Pemilihan Legislatif Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Bandar Lampung memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk aktif dalam dunia politik, khususnya dalam pencalonan sebagai calon anggota legislatif.
2. Regulasi pemilu legislatif memberikan kesetaraan gender bagi perempuan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Bandar Lampung, yaitu dengan adanya kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif.
3. Pemilu legislatif memberikan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Bandar Lampung, untuk berkompetensi secara sehat dengan kaum laki-laki.
4. Perempuan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Bandar Lampung dalam konteks kehidupan sosial dapat melaksanakan peran ganda sebagai politisi dan ibu/istri dalam keluarga dengan menjaga keseimbangan peran ganda tersebut.
5. Budaya di Indonesia yang bersifat patriarkis terkait dengan peran perempuan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Bandar Lampung dalam politik dapat diminimalisasi dengan kapasitas dan kemampuan serta partisipasi perempuan dalam dunia politik.
6. Peran aktif kaum perempuan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Bandar Lampung dalam dunia politik akan dapat menggeser pola kebudayaan patriarkis melalui perjuangan hak dan kepentingan perempuan dalam lembaga legislatif.
7. Relevansi antara dinamika kultural dengan perkembangan politik untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan dapat dilaksanakan melalui perjuangan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Bandar Lampung dalam proses pencalonan.

8. Peran aktif kaum perempuan dalam dunia politik akan dapat menghapuskan ketidakadilan gender terhadap kaum perempuan melalui pencalonan sebagai anggota legislatif pada PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Bandar Lampung .
9. Langkah strategis kaum perempuan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Bandar Lampung dalam meminimalisasi ketidakadilan gender terhadap kaum perempuan khususnya dalam dunia politik adalah dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan kaum perempuan dalam dunia politik, khususnya melalui lembaga legislatif.
10. Peran kaum perempuan dalam dunia politik dapat menghilangkan ketidakadilan gender

melalui upaya nyata calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Bandar Lampung dalam berkompetisi pada pemilihan sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan hak dan kepentingan kaum perempuan dalam politik.

Berdasarkan uraian mengenai budaya patriarkis dalam Pemilihan Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 maka dapat disajikan matriks budaya patriarkis berdasarkan komponen-komponen kognitif (berkaitan dengan pengetahuan atau pemahaman), afektif (berkaitan dengan perasaan) dan psikomotorik (berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang) dari setiap informan yaitu PDI Perjuangan , Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

Matrik budaya patriarkis dalam Pemilihan Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 pada informan PDI Perjuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Informan PDIP	Budaya Patriarkis		
		Aspek Kognitif	Aspek Afektif	Aspek Psikomotor
1	Hj. Wiwik Angraini	Mengetahui bahwa budaya patriarkis masih berkembang dalam konteks sosial politik di Indonesia masyarakat, namun hal tersebut tidak terjadi pada PDI Perjuangan karena pemimpin umum PDI Perjuangan adalah seorang perempuan	Secara emosional menentang adanya budaya patriarksi dengan menunjukkan adanya penentangan dan ketidaksetujuan terhadap dominasi kaum laki-laki dalam kehidupan politik	Merasa yakin dan mantap bahwa dengan menjadi anggota legislatif maka hak dan kepentingan kaum perempuan akan secara optimal diperjuangkan melalui ranah politik, sehingga menjadi anggota legislatif adalah pilihan tepat untuk menghilangkan budaya patriarkis
2	Rohati	Menyadari bahwa budaya patriarkis terkadang masih menjadi hambatan karena hal tersebut sudah mengakar dalam budaya di Indonesia sehingga membatasi ruang gerak perempuan dalam berpolitik	Sangat menentang adanya budaya patriarkis dan berusaha untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan melalui pencalonan sebagai caleg. Berupaya untuk terus memperjuangkan hak dan kepentingan kaum perempuan dalam politik, khususnya dengan menjadi caleg	Secara tegas menolak budaya patriarkis dengan cara mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam rangka memperjuangkan hak-hak dan kepentingan kaum perempuan pada ranah politik

3	Fandi Chandra SE	Budaya patriarkis sebagai suatu sistem yang dianut oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia termasuk dalam dunia politik, tetapi PDI Perjuangan berusaha untuk menghilangkan hal tersebut melalui adanya persamaan hak dan derajat kaum perempuan dalam dunia politik	Menentang adanya budaya patriarkis sebab sama saja dengan memberikan atau menciptakan kesenjangan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik, khususnya melalui pencalonan sebagai anggota legislatif	Memberikan kesempatan yang sama kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk mencalonkan diri sebagai caleg melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh partai sehingga tidak ada perbedaan perlakuan terhadap kaum laki-laki dan perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik.
---	------------------	--	--	--

Budaya patriarkis sebagai bagian dari budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas masyarakat terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada didalam sistem itu. budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Budaya politik dianggap sama dengan konsep idiologi yang dapat berarti sikap mental, pandangan hidup, dan struktur pemikiran. Kebudayaan politik akan sangat terkait dengan struktur politik yang ada di mana budaya politik tersebut berkembang. Adanya orientasi negatif pada masyarakat mengisyaratkan bahwa belum adanya hubungan yang harmonis/seimbang antara struktur dan kultur politik yang bersangkutan.

Konsep gender mengandung pengertian hubungan kekuasaan (*power relationship*) antara laki-laki dan perempuan. Dalam keluarga, masyarakat dan negara, hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya mengandung asumsi adanya kekuasaan yang lebih besar pada pihak laki-laki. Perempuan bukanlah kelompok orang yang sejak kelahirannya berhak

menuntut klaim atas kekuasaan. Pandangan demikian bukan hanya dianut dalam lingkup keluarga, tetapi kemudian diturunkan menjadi dalil yang diikuti dalam pengaturan kekuasaan dalam masyarakat dan negara. Dengan demikian, laki-laki “diakui” dan “dikukuhkan” untuk menguasai perempuan. Kemudian hubungan laki-laki dan perempuan yang hierarkis, dianggap sudah benar. Situasi ini adalah hasil belajar manusia dari budaya patriarki. Dalam budaya ini, berbagai ketidakadilan muncul dalam berbagai bidang dan bentuk.

Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, menyebabkan status perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara menjadi rendah (hubungan kekuasaan yang tidak seimbang menyebabkan terjadinya subordinasi status). Status perempuan yang rendah ini kemudian dipelihara, disosialisasikan melalui pembagian kerja secara seksual serta akses dan kontrol sumber daya yang tidak adil bagi kaum perempuan untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik.

Selanjutnya matrik budaya patriarkis dalam Pemilihan Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 pada informan Partai Nasdem dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Informan Nasdem	Budaya Patriarkis		
		Aspek Kognitif	Aspek Afektif	Aspek Psikomotor
1	Dini Masyuni, SE	Memahami bahwa budaya patriarkis merupakan hambatan bagi perempuan untuk berperan secara aktif dalam kehidupan politik, tetapi Nasdem memberikan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan untuk berperan secara aktif dalam politik praktis, khususnya dalam pencalonan sebagai anggota legislatif	Tidak setuju dan menentang adanya subordinasi terhadap perempuan dalam konteks kehidupan politik, sehingga perasaan tidak suka dan penentangan tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan pada informan dalam aktivitas politik praktis, yaitu dengan menjadi calon anggota legislatif.	Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan berupaya untuk mengaktualisasikan kesetaraan gender dan meminimalisasi budaya patriarkis dalam dunia politik. Hal ini didorong adanya semangat untuk menampilkan Nasdem sebagai partai baru yang tidak menganut budaya patriarkis.
2	Novi Balga	Mengetahui bahwa budaya patriarkis tidak boleh dibiarkan berkembang, sehingga harus ada upaya nyata dari kaum perempuan untuk menghilangkan sedikit demi sedikit budaya tersebut, dengan terlibat secara aktif dalam dunia politik	Menolak budaya patriarkis sebab apabila budaya ini terus berkembang sama saja dengan membiarkan kaum perempuan menjadi subordinasi dari kaum laki-laki, dan partai Nasdem berupaya untuk menghapuskan anggapan tersebut	Mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dengan tujuan agar hak-hak dan kepentingan kaum perempuan dapat terwakili serta dapat disejajarkan dengan kaum laki-laki, khususnya dalam dunia politik
3	Fauzan Sibron SE, Akt	Budaya patriarkis pada dasarnya adalah suatu nilai yang dianut masyarakat dan tidak terlalu signifikan dampaknya apabila kaum perempuan memiliki kapasitas dan kemampuan yang besar untuk berperan dalam politik praktis	Kaum perempuan harus memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai, bukan hanya berkompetisi dengan sesama kaum perempuan dalam dunia politik, tetapi juga dengan kaum laki-laki yang selama ini mendominasi politik praktis.	Partai Nasdem memberikan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan untuk berperan secara aktif dalam dunia politik, khususnya dalam pencalonan diri sebagai anggota legislatif sehingga menunjukkan arah dan perjuangan partai dalam mendukung hak dan kepentingan perempuan

Konstruksi sosial ideologi patriarki menempatkan perempuan sebagai ibu dalam konteks pembatasan-pembatasan yang dianggap

sesuai dengan kodratnya sebagai ibu. Di satu sisi ia merupakan makhluk yang dimuliakan karena kemampuan hamil dan melahirkan sebagai bagian

penting dalam kelangsungan hidup manusia. Bagi pasangan suami-isteri menghasilkan keturunan merupakan indikator penting keberhasilan berumah tangga. Sukses seorang ibu dalam mengemban tugas menghasilkan calon penerus keluarga dianggap sebagai suatu kewajiban yang sudah sewajarnya. Dalam kiprahnya di dunia politik, perempuan tidak lepas dari beberapa hambatan dan bagian-bagian yang mempengaruhi lingkungannya. Berbagai pandangan tentang perempuan yang kurang menyeluruh, sering mengandereestimatkan perempuan, yang khawatir akan perannya sebagai professional di luar rumah dengan fitrah perempuan dengan urusan domestiknya. Mengingat budaya patriarki di Indonesia sangatlah kuat pengaruhnya, maka pria yang melakukan budaya semacam ini akan berpengaruh secara mutlak di keluarga. Pria lah yang berhak mengambil keputusan ketika ada masalah dan pria jugalah yang menuntukan iya atau tidaknya sesuatu yang dilakukan oleh keluarganya itu boleh dilakukan atau tidak.

Keputusan adalah suatu reaksi terhadap solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Hal ini jugalah yang menghambat kaum wanita untuk berkembang karena mereka akan merasa menjadi orang yang tidak berguna karena biasanya hanya tinggal di rumah dan mengurus urusan rumah tangga saja. Kesetaraan jender salah satunya dapat diukur dari kesamaan hak pengambilan keputusan dan masih dominannya suami dalam pengambilan keputusan. Perempuan

berada di strata bawah sehingga takut otonominya berbeda dalam keluarga sedangkan pengertian otonomi adalah kemampuan untuk bertindak melakukan kegiatan, mengambil keputusan untuk bertindak atas kemauan sendiri. Ada beberapa orang yang pro dan kontra terhadap budaya patriarki di Indonesia. Beberapa dari mereka setuju dengan budaya ini namun beberapa dari mereka tidak setuju dengan budaya ini karena dirasa banyak sekali kejanggalan yang terjadi dan biasanya orang yang kontra terhadap budaya patriarki adalah kaum perempuan.

Beberapa anggapan yang berkembang dalam budaya politik patriarkis adalah anggapan bahwa urusan perempuan hanyalah urusan rumah tangga (keluarga) saja. Anggapan seperti ini menyebabkan adanya pembatasan kesempatan bagi perempuan yang ingin mempunyai kegiatan di luar rumah, misalnya berorganisasi atau kegiatan politik. Walaupun diberi kesempatan mengikuti kegiatan di luar rumah, kaum perempuan sendiri tidak percaya diri dan ragu-ragu, karena takut dianggap berperilaku tidak wajar. Anggapan bahwa perempuan itu kurang menggunakan kemampuan pikiran, hanya mengandalkan perasaannya dan kurang tegas. Oleh karena itu perempuan dianggap tidak cocok menjadi wakil rakyat, karena wakil rakyat harus tegas seperti laki-laki. Kalau ada perempuan yang menjadi wakil rakyat dan tegas, ia disebut seperti laki-laki dan sebaliknya kalau ada laki-laki yang menjadi wakil rakyat tapi kurang tegas, ia disebut seperti perempuan. Anggapan lain adalah perempuan bersifat lemah lembut, sehingga tidak cocok berpolitik karena politik dianggap sebagai dunia yang keras.

Selanjutnya matrik budaya patriarkis dalam Pemilihan Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 pada informan PKS dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Informan PKS	Budaya Patriarkis		
		Aspek Kognitif	Aspek Afektif	Aspek Psikomotor
1	Evi Virdiana, S.Si.	Menyadari adanya kendala bagi kaum perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan politik. Pola-pola pemikiran tradisional yang masih dianut beberapa pengurus partai, namun secara kelembagaan hal tersebut tidak dianut PKS.	Secara tegas menolak patriarkis dengan kenyataan masih adanya praktik budaya patriarkis yang dilakukan oleh para elit PKS yang tradisional	Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk menghapuskan anggapan bahwa perempuan muslim tidak layak menjadi politisi dan menjadi objek yang dipimpin kaum laki-laki. Sehingga melalui pencalonan akan nampak upaya nyata dalam menghilangkan budaya patriarkis yang ada dalam praktik politik di PKS.
2	Farida Yuniarti, S.S	Mengetahui bahwa ada para petinggi partai yang menganggap keterlibatan perempuan dalam politik bersifat tidak signifikan sebab kaum laki-laki pada dasarnya adalah wakil dari kaum perempuan	Menganggap bahwa kaum perempuan tidak harus menjadi politisi dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya, sebab kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan juga akan memperjuangkan kepentingan kaum perempuan	Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak untuk menghapuskan budaya patriarkis sebab hal tersebut tidak akan mungkin untuk dihapuskan, tetapi lebih bersifat untuk menambah pengalaman dan keterampilan dalam politik praktis dengan menjadi anggota legislatif
3	Syarif Hidayat, ST	PKS pada dasarnya menghargai dan berupaya untuk mewujudkan kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik, yaitu memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan	Perempuan harus memiliki kualitas keilmuan, kepribadian dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni jika hendak mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif	Mendukung upaya kaum perempuan PKS untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sebagai media dakwah dan pembelajaran bagi kaum perempuan untuk berperan atau berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik praktis.

Berdasarkan tabel matrik di atas maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan dari aspek kognitif terdapat persamaan pemahaman dan pandangan calon anggota legislatif perempuan dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung. Persamaannya adalah dalam hal menilai bahwa budaya patriarkis sebagai suatu sistem yang harus diminimalisasi dan dihapuskan dalam politik praktis, khususnya dalam pencalonan sebagai anggota legislatif. Pemilihan Legislatif bukan formalitas memilih calon anggota legislatif, tetapi berperan dan

berfungsi sebagai media dalam menghantarkan rakyat menuju terselenggaranya demokrasi daerah yang kuat, efektif, tanggap serta berdaya guna dan berhasil guna. Kejujuran dalam seluruh rangkaian jalannya persiapan, pelaksanaan bahkan sampai perhitungan akhir penyelenggaraan sangat penting demi terjaganya demokrasi itu sendiri. Dalam Pemilihan Legislatif, calon yang terpilih harus benar-benar memiliki jiwa tanggungjawab pada publik atau masyarakat, sehingga tujuan dari demokrasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur tercapai.

Ditinjau dari aspek afektif, terdapat persamaan sikap dan perasaan bahwa para informan caleg menentang budaya patriarkis dan tidak setuju terhadap dominasi kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sehingga para informan caleg berupaya untuk terus memperjuangkan hak dan kepentingan kaum perempuan dalam politik. Perbedaan sikap ditunjukkan oleh informan dari PKS yang masih memberikan toleransi pada pandangan elit PKS yang tradisional dan menganggap bahwa kaum perempuan tidak seharusnya menjadi politisi sebab kaum laki-laki dianggap sebagai pemimpin bagi kaum perempuan.

Selanjutnya ditinjau dari aspek psikomotorik secara umum para informan dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif bertujuan sama yaitu akan memperjuangkan hak dan kepentingan kaum perempuan dalam dunia politik secara lebih optimal, sebab melalui peran aktif sebagai anggota legislatif inilah maka sedikit demi sedikit praktik budaya patriarkis akan dapat dihilangkan dalam kehidupan politik, khususnya dalam pencalonan sebagai anggota legislatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat persamaan bahwa budaya patriarkis tidak menjadi hambatan bagi calon anggota legislatif perempuan pada PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PKS Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Calon Legislatif pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014. Hal ini didasarkan pada deskripsi jawaban responden yang secara umum menunjukkan bahwa partai politik tidak membatasi perempuan dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif serta memberikan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik praktis menghadapi Pemilu Legislatif 2014. Perbedaannya nampak pada sikap yang ditunjukkan oleh informan dari PKS yaitu masih memberikan toleransi pada pandangan elit PKS yang tradisional dan menganggap bahwa kaum perempuan tidak seharusnya menjadi politisi sebab kaum laki-laki dianggap sebagai pemimpin bagi kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Arivia, Gadis. 2004. *Filsafat Bersperspektif Feminis*. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
- Bhasin, Kamla. 1996. *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, (terjemahan). Yayasan Bentang Budaya dan Yayasan Kalyanamitra, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
2000. *Partisipasi dan Partai Politik. Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- El Sadaawi, Nawal, 2001. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik. Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Haryanto, 1998. *Partai Advokat. Wacana Keberpihakan dan Gerakan*. Klik Jogjakarta.
- Hermawan, Eman dkk. 2004. *Partai Advokat. Wacana Keberpihakan dan Gerakan*. Klik_R Jogjakarta.
- Hikam, Muhammad A.S. 2002. *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Penerbit Bentara. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya Bandung.
- Murniati, 2004. *Media dan Gender*. Ford Foundation dan LP3Y. Yogyakarta.
- Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. SIC. Surabaya.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Dokumen & Skripsi

Darmaستی, Ari. 2001. *Gender dalam Pembuatan Keputusan Keluarga dan Masyarakat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. (Bahan Ajar).

Dercellina, Susan. 2009. *Strategi Kampanye Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Propinsi Lampung*. Skripsi. FISIP Universitas Lampung.

Pribadi, Hastato. 2011. berjudul *Orientasi Politik Aktivistis Perempuan LSM Damar LSM Sekar Sewu Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2010*. Skripsi. FISIP Universitas Lampung.